

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008, penyusunan renstra SKPD merupakan bagian dari upaya untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan renstra SKPD juga dimaksudkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, dalam hal ini sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran atau penilaian kinerja melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan atas peningkatan kinerja SKPD atau sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sebagai bahan untuk menentukan suatu keputusan yang mendasar yang dinyatakan dalam skala prioritas untuk menyusun rencana operasional kegiatan OPD dalam mencapai arah kebijakan dan tujuan akhir.

Alur pemikiran yang termaktub dalam renstra OPD mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi bupati yang diterjemahkan ke dalam visi dan misi OPD. Visi dan misi OPD ini dikembangkan ke dalam bentuk strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Empat Lawang terpilih. Fokus di bidang komunikasi dan informatika adalah pada pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi difokuskan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi khususnya melalui jaringan

internet dengan perluasan dan peningkatan kapasitas, kelancaran, serta kualitas jangkauan komunikasi sampai ke pedesaan dengan dukungan regulasi dan penyelenggaraan komunikasi yang terpadu. Pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai suatu rangkaian sistem yang sinergis, efisien dan efektif dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang tahun 2017-2022 ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 no. 47, Tambahan Negara Republik Indonesia no. 4286);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah direvisi dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), yang telah direvisi dengan Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang – Undang nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4677);
5. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Praturan Daearah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Negara Ri Nomor 4817) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Bidang Persandian;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 09 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Empat Lawang:

1. untuk menentukan diagnosa organisasi terhadap penyampaian hasil yang di inginkan secara objektif;
2. untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat karena pola – pola pelayanan yang perlu diselenggaraan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang kompleks.
4. untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi;
5. untuk pengelolaan pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Empat Lawang tahun 2013-2018 adalah untuk;

- a. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang dalam lingkup Kominfo dengan visi dan misi dinas;
- c. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar seksi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan.
- d. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Diskominpo selama kurun waktu 2013 s/d 2018

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- b. Sumber Daya OPD
- c. Kinerja Pelayanan OPD
- d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- b. Telaahan visi, misi dan program kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih
- c. Telaahan Renstra K/L dan renstra provinsi dan renstra kabupaten
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis
- e. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB.IV VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN.STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- a. Visi dan Misi OPD
- b. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah OPD
- c. Strategis dan Kebijakan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Pemberian perizinan dan pembinaan, serta pengawasan usaha di bidang komunikasi dan informatika;
- d. Pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas;
- f. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- h. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, tata usaha dan hubungan masyarakat, serta urusan rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi
- j. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Stuktur Organisasi OPD

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c) Kabid Diseminasi dan Sarana Komunikasi
 1. Kepala Seksi Sarana/ Prasarana Komunikasi

2. Kepala Seksi Diseminasi dan Informasi
 3. Kepala Seksi Program Monev Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi
- d. Kabid persandian
1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
 2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 3. Kepala Seksi Program Monev Bidang Persandian
- e) Kabid Tata Kelola e-Government dan Informasi
1. Kepala Seksi Dan Tata Kelola Informasi Dan Dokumentasi
 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Berklarifikasi
 3. Kepala Seksi Program Dan Monev Bidang Tata Kelola e-Government dan Informatika

B. SUMBER DAYA SKPD

1. Susunan Kepegawaian dan Pendidikan

Susunan kepegawaian tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan disajikan dalam tabel berikut :

Susunan Kepegawaian Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2017

Table 1

Tingkat Pendidikan	Pangkat / golongan (Orang)										Jml (Org)
	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	TKS	1
S3											0
S2		2		1							3
S1	2	1		5	1					6	15
Akademi/ DIII										1	1
SLTA								2		11	13
SLTP										3	3
SD											0
Jumlah	2	3	0	6	1	0	0	2	0	21	35

Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika

DATA KEBUTUHAN PEGAWAI DISKOMINFO TAHUN 2017

Tabel 2.

No. Urut	Jabatan	Eselon	Jumlah pegawai	Kebutuhan	Kekurangan/Kelebihan
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas;	II/b	1	1	-
2	Sekretariat	III/a	1	1	-
a	Sub bagian umum, kepegawaian dan Pelaporan	IV/a	1	1	-
b	Sub bagian keuangan dan Perencanaan	IV/a	-	1	-1
3	Kabid Desiminasi dan sarana komunikasi	III/b	1	1	
a.	Kasi Sarana/Prasana Komunikasi.	IV/a	1	1	
b.	Kasi Deseminasi Informasi	IV/a	1	1	
c.	Kasi Program dan Monev Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi	IV.a	1	1	
4	Kabid Persandian	III/b	1	1	
a.	Kasi Tata Kelola Persandian	IV/a	1	1	
b.	Kasi Operasional Pengamanan Persandian	IV/a	1	1	
c.	Kasi Program Persandian dan Monec Bidang Persandian	IV/a	1	1	
5	Kabid Tata Kelola E-Government dan Informatika	III/b	1	1	
a.	Kasi Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi	IV/a	1	1	
b.	Kasi Pelayanan Informasi Berklasifikasi	IV/a	1	1	
c.	Kasi Program dan Monev bidang tata kelola E-Government dan Informatika.	IV/a	1	1	

sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika

C. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika telah mendorong terjadinya transformasi transaksi ekonomi maupun non ekonomi. Saat ini teknologi komunikasi banyak digunakan sebagai sarana transaksi. Transformasi dalam bidang komunikasi antar penduduk telah mengalami tahapan dari komunikasi melalui surat, telegram, telepon tetap dan sekarang komunikasi lebih banyak dilakukan melalui telepon seluler dan internet.

Proses transformasi komunikasi berlangsung dengan cepat. Telepon seluler telah beralih fungsi dari sekedar alat komunikasi sederhana ke dalam bentuk

gadget yang multi-fungsi. Sekarang telah beredar gadget yang sekaligus meliputi fungsi telepon, moda komunikasi internet, games dan televisi. Komputer juga bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih ringkas berupa notebook atau komputer tablet. Telepon tetap mulai ditinggalkan oleh penduduk. BPS mencatat dalam kurun waktu 2008-2010, jumlah pelanggan telepon rumah terus menurun yaitu rata-rata sebesar 17,07 persen per tahun. Tahun 2010 jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Empat Lawang tercatat 611 pelanggan, dimana sekitar 561 (91,82 persen) pelanggan perumahan dan sisanya 50 (8,18 persen) pelanggan bisnis.

Layanan akses internet saat ini bekerja sama dengan provider Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) baik Main Connection maupun Backup Connection.

Jalur layanan internet ini belum terkoneksi ke seluruh OPD yang berada dalam lingkup perkantoran pemerintah kabupaten. Besarnya kapasitas bandwidth layanan internet ini kecenderungannya mengalami kenaikan tiap bulan disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur pemerintah yang mengakses internet.

Jalur internet yang terdapat di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang belum terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur internet ini digunakan OPD untuk mengakses Sistem Informasi. Sistem Informasi yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu: Mail Server dan Web Server, sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang terdapat di luar Dinas Komunikasi dan Informatika juga dapat diakses oleh seluruh OPD yang terdapat di lingkungan perkantoran pemerintah kabupaten.

Aplikasi-aplikasi yang berjalan di jalur internet diantaranya adalah SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah), LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), SIMP (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan).

Access poin dioergunakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjangkau PC komputer atau Notebook yang memiliki wireless. Access poin terletak di perkantoran pemerintah kabupaten dimana menjadi pelayanan untuk publik dilaksanakan, antara lain terletak di halaman Kantor Pemkab Empat Lawang, Kantor Camat Tebing Tinggi dan Pesantren Sungai Lidi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang mempunyai satu server yang dapat dipergunakan sebagai mail server, web server, yang belum difungsikan dan untuk sementara akses internet masi menggunakan jasa hosting. Web server menangani khusus situs resmi pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dengan domain www.empatlawangkab.go.id. Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat menginginkan informasi secara cepat. Situs Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi.

Data tentang perkembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut :

Jumlah Warnet, PLIK dan MPLIK Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2012

No.	Kecamatan	Warnet	PLIK	MPLIK
1	2	3	4	5
1	Muara Pinang	5	3	1
2	Lintang Kanan	-	-	-
3	Pendopo	5	1	-
4	Pendopo Barat	-	-	-
5	Pasemah Air Keruh	1	1	-
6	Ulu Musi	2	2	-
7	Sikap Dalam	-	-	-
8	Talang Padang	1	1	1
9	Tebing Tinggi	10	1	1
10	Saling	-	-	-
	Empat Lawang	24	9	3

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang

Keterangan : PLIK = Pusat Layanan Internet Kecamatan

MPLIK = Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan

**Jumlah Jaringan Telepon Genggam / Stasioner Menurut
Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2012**

No	Kecamatan	Jumlah Stasioner
1	2	3
1	Muara Pinang	11
2	Lintang Kanan	2
3	Pendopo	3
4	Pendopo Barat	2
5	Pasemah Air Keruh	2
6	Ulu Musi	2
7	Sikap Dalam	1
8	Talang Padang	1
9	Tebing Tinggi	5
10	Saling	6
	Jumlah / Total 2012	35
	2011	31

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang

D. TANTANGAN DAN PELUANG DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Tantangan

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi tantangan untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Bupati Empat Lawang Periode 2013 – 2018 di bidang komunikasi dan informatika serta perlu mendapat perhatian prioritas dalam perencanaan strategik Periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
- b. Keterbatasan kewenangan daerah;
- c. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
- d. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
- e. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
- f. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
- g. Rendahnya dukungan penetapan prioritas dan penganggaran;
- h. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki;

- i. Lemahnya tata kelola data instansi dalam menyediakan data secara cepat, tepat dan akurat;
- j. Kurangnya motivasi masyarakat untuk membentuk komunitas jaringan informasi;
- k. Rendahnya kesadaran akan keamanan data dan informasi;

2. Peluang

Pada sisi lain, Kabupaten Empat Lawang memiliki nilai positif yang menjadi **peluang** untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Bupati Empat Lawang periode 2017-2018 di bidang komunikasi dan informatika, antara lain :

- a. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
- b. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika;
- c. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika;
- d. Kuatnya dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah terhadap pengembangan kapasitas SDM;
- e. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- f. Adanya fasilitas bantuan dari kementerian dan lembaga;
- g. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
- h. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.
- i. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur infotel berupa bantuan social ICT, WIM, PLIK dan MPLIK;
- j. Adanya Kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam membangun area pelayanan wifi gratis bagi masyarakat;
- k. Adanya dukungan yang kuat dari media massa dalam melakukan deseminasi informasi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Paket lelang (konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) sudah mencapai 100% kecuali jasa konsultasi	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. perpresNo. 80/2003 berikut Perubahannya dan Terakhir Dirubah oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya komitmen pimpinan daerah kab/kota tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; ➢ tidak adanya sanksi yang secara tegas mengharuskan pemanfaatan LPSE 	Kekurangan sarana dan prasarana
	Lelang Jasa Konsultansi dilaksanakan tahun 2011	4. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54/ 200 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bimtek jasa konsultasi masih terbatas; ➢ Aplikasi SPSE dari LKPP
	Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai (tahun)		Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi	Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal yang bergabung ke Kab. Empat Lawang	Kekurangan tenaga verifikator
infrastruktur e-government	Terselenggaranya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke seluruh OPD Kab. Empat lawang (..... unit kerja)	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinatah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Status keberadaan jaringan belum menggunakan mekanisme penganggaran secara <i>fixed cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya ➢ Pemanfaatan jaringan oleh OPD, kab/kota dan kecamatan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi ➢ Tenaga operator di OPD, kab/kota dan kecamatan belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi
	Terselenggaranya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke 14 unit kerja				
	Terselenggaranya infrastruktur jaringan WAN kecamatan berbasis VPN <i>Instant</i> ke 156 kecamatan				

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	Permasalahan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
infrastruktur <i>e-government</i>	Terbangun dan termanfaatkannya aplikasi dan konten secara <i>online</i> (SIPKD, LPSE, BPPT, paperless office)	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan server untuk SIPKD memerlukan peningkatan kapasitas untuk pelayanan bagi seluruh OPD	Belum seluruh OPD memanfaatkan jaringan infrastruktur on line untuk SIPKD dan <i>paperless office</i>	Perlunya sosialisasi lebih mendalam dalam bentuk bimtek dan pendampingan bagi masing-masing OPD
	Terlaksananya edukasi literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK		- Ketersediaan SDM operator dan instruktur bagi edukasi literasi TIK belum memenuhi standar minimal - Belum adanya SOP dan SPM bagi penyelenggaraan bimtek	Beragamnya kualifikasi peserta bimtek dan edukasi literasi TIK aparatur dan masyarakat	
	Tersusunnya dan diterbitkannya regulasi berupa Perda Penyelenggaraan Kominfo;		Sosialisasi Perda kepada seluruh komponen masyarakat terutama pemangku kepentingan bidang kominfo belum didukung oleh juklak dan juknisnya	Penyebarluasan tentang keberadaan Perda melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan bidang kominfo	Penyebarluasan informasi tentang Perda
	pembinaan, monitoring dan evaluasi telematika belum optimal		Belum terkompilasinya data hasil pemetaan potensi bidang telematika di kab/kota	Koordinasi terkait bidang telematika di kab/kota ter-kendala karena struktur SOTK kab/kota yang berbeda-beda	Perlu secara berkala melakukan koordinasi dengan kab/kota khusus bidang kominfo
Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik	Terbangunnya website interoperabilitas	Pergub No. 7/2009 Tentang Pendayagunaan <i>WebSite</i> di Lingkungan Pemerintah Kab. Empat Lawang	Bimtek, sosialisasi	Kebijakan gubernur, respon OPD	Terbatasnya SDM tenaga teknis
	Penggunaan domain go.id tingkat kabupaten telah mencapai%				
	Pelaksanaan layanan kumpulan data melalui pemanfaatan infrastruktur <i>e-government</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sudah memiliki aplikasi terinte-grasi bidang sosbudpol dan perekonomian ➢ Sudah memiliki aplikasi SMS gateway ➢ 	Belum optimalnya up dating data dari OPD bersangkutan	Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi
	Koordinasi interoperabilitas implementasi pengembangan <i>e-government</i>	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>	Sudah memiliki aplikasi data tak terstruktur	Belum tersosialisasikann ya aplikasi pada OPD	Keterbatasan anggaran
Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik	Fasilitas <i>hosting website</i>	Peraturan Bupati No. Tentang Pendayagunaan <i>WebSite</i> di Lingkungan Pemerintah Kab. Empat Lawang	Memiliki kewenangan dalam pengaturan <i>hosting website</i>	Masih ada sebagian OD yang belum hosting ke website www.empatlawang-kab.go.id	Pemahaman tupoksi Diskominfo yang belum diapresiasi secara penuh oleh OPD
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Penggelaran kabel di jalan provinsi dan lintas kab/kota	1. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Permenkominfo No. 23/2009 Tentang Usaha Jasa Titipan	Belum adanya juklak / juknis untuk memproses legalitas penggelaran kabel	Tumpang tindihnya kewenangan dan Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota	Regulasi kurang mendukung.
	Data kantor cabang dan loket pelayanan operator		Belum adanya juklak/ juknis untuk memproses legalitas kantor cabang loket pembayaran operator	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota	Ada persinggungan perijinan dengan kab/kota (SITU), Regulasi kurang mendukung
	Identifikasi telsus tanpa menggunakan frekuensi		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas	Tidak teridentifikasinya penyelenggara telsus tanpa frekuensi cakupan provinsi	Objek/rincian tidak ada
	Dokumen penyusunan prosedur, mekanisme pengukuran frekuensi		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas	Regulasi dari pemerintah Pusat kurang mendukung	Belum tersedianya Dokumen penyusunan prosedur, mekanisme pengukuran frekuensi
	Belum adanya tupoksi pengelolaan pendapatan		Belum merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Kominfo	Kurang optimalnya koordinasi antar OPD perihal pengelolaan keuangan	Menjadi temuan Inspektorat
Diseminasi Informasi	Termanfaatkannya Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan lembaga penyiaran	LPP mempunyai segmentasi program tersendiri	Perlu adanya koordinasi dalam menyamakan antara kewenangan Dinas Kominfo dengan segmentasi program Lembaga Penyiaran
	Termanfaatkannya media cetak sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/ 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 3. UU No. 40/1999 Tentang Pers	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media cetak		
	Termanfaatkannya media tradisional dan media luar ruang sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media tradisional dan media luar ruang		
	Termanfaatkannya sarana TIK melalui media video conference	1.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi kan dan memanfaatkan media video conference		
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Telah terbentuk PPID di lingkungan OPD Kabupaten Empat Lawang.	1. UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Pembentukan PPID, 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik			
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran	Proposal permohonan ijin melalui Kementerian Kominfo dan KPID	Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Perijinan Penyiaran di Daerah	Kurangnya Sosialisasi Kepmenkominfo No. 18 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersosialisasinya perizinan frekuensi radio ; ➢ Belum adanya Forum rapat bersama (FRB) penetapan ijin penggunaan frekuensi radio 	Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi dan teknis
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	Belum terbentuknya Bakohumas Kabupaten Empat Lawang	Permodelan KIM Tahun 2008	Penataan Organisasi OPD dan Penetapan tupoksi kehumasan belum terakomodasi	Belum selesainya penyerahan urusan kehumasan antar OPD	Belum terkoordinasikan-nya informasi program-program pemerintah
Aplikasi Layanan Informasi Publik	Telah terbangun aplikasi layanan informasi publik				
Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai 99 orang dengan kompetensi Teknis yang terbatas		Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya ruang Server, Ruang Internet Publik/Media Center, Ruang Workshop, Ruang Kerja Pegawai,	UU No. 8/1974 Tentang Pokok- Pokok kepegawa-an sebagaimana telah diubah de-ngan UU No.43/ 1999	Prioritas Penentuan Kegiatan	Kebijakan Penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi : “TERWUJUDNYA EKONOMI MAJU, AMAN, SEHAT DAN SEJAHTERA (EMASS) GEMILANG”

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 Meningkatkan Pelayanan Melalui Pembangunan Infrastruktur Wilayah Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Masyarakat Misi 3 Meningkatkan Sosial Dan Budaya			
	1. Program Pengembangan data/informasi /statistik Daerah;	1. Lemahnya tata kelola data instansi dalam menyediakan data secara cepat, tepat dan akurat; 2. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi	1. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan data secara intensif; 2. Kurangnya insentif bagi SDM pengelola data 3. Belum ada jukalak dan juknis tentang pengelolaan data 4. Belum tersedianya jaringan pengelolaan data	1. Adanya BPS 2. Adanya regulasi yang mewajibkan untuk melengkapi data OPD sebagai persyaratan penerimaan bantuan dana
	1. Program Penelitian dan Pengembangan.	1. Kurangnya intensitas penelitian dan pengembangan 2. Kurangnya dukungan anggaran 3. Banyaknya kegiatan penelitian yang tidak tepat sasaran 4. Kurangnya apresiasi terhadap hasil penelitian	1. Belum terklasifikasinya litbang sebagai prioritas daerah 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya litbang	1. Banyaknya lembaga penelitian 2. Besarnya kebutuhan akan kajian pendukung pengembangan ekonomi masyarakat

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dan masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik 2. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika 3. Belum dijadikan prioritas program	1. Program 2. Banyaknya Lembaga Pendidikan bidang Komunikasi dan Informatika 3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika 4. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;			
2	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah	1. Masih terbatasnya infrastruktur internet; 2. Masih rendahnya kemampuan TIK aparatur dan penyedia barang/jasa 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Penggunaan jalur VPN yang belum optimal di setiap OPD; 2. Rendahnya motivasi aparatur dan dunia bisnis untuk meningkatkan penguasaan komunikasi dan informatika 3. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak & Juknis) penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika	2. Bimtek SPSE yang terus menerus 3. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
3	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	3. Program peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;	1. Belum adanya jaringan kabel FO 2. Masih terbatasnya jaringan wifi 4. belum tersusunnya masterplan pengembangan infrastruktur infokom	3. terbatasnya anggaran 4. kontur wilayah dan sebaran penduduk kurang menguntungkan secara ekonomis	1. Berdirinya Diskominfo sebagai OPD 2. Kuatnya dukungan pemerintah pusat 3. Pesatnya perkembangan teknologi
	4. Program kerjasama informasi dan media massa.	Kurang aktifnya OPD dalam mendeseminasi informasi pembangunan sektor 2. Belum terbentuknya komunitas informasi	Rendahnya kapasitas SDM dalam urusan deseminasi 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya public relation	1. Meluasnya kepemilikan alat komunikasi massa 2. Berkembangnya media massa online
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
5	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terbatasnya sarana dan prasarana 2. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya anggaran	Program Empat Lawang <i>Cyber City</i>
		Beban penggunaan SPSE yang terus meningkat	Belum aktifnya media penyimpanan di server LPSE	Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP
6	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingginya intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang memiliki kapasitas yang terbatas;	1. Relatif pendeknya umur teknis perangkat elektronik yang semakin habis. 2. Terbatasnya anggaran	Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas

C. TELAAHAN RENSTRA K/L, RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA KABUPATEN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah	Keterbatasan kewenangan daerah	Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kewenangan penentuan lokasi penyelenggaraan pos 2. Risiko kehilangan data cukup besar 3. Risiko kontinuitas layanan 4. Rekomendasi penyiaran belum dijadikan sebagai suatu syarat proses perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kewenangan Provinsi 2. Belum adanya <i>Disaster Recovery Plan</i> 3. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif 	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
3	Tersedia dan tersebar informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program	Adanya kesamaan fungsi dan wewenang
4	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika 	Adanya kesamaan fungsi dan peran
		Komunikasi dan Informatika <ol style="list-style-type: none"> 4. Masih rendahnya Dukungan keberlanjutan program dan anggaran 		

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Faktor
----	----------------	--------------	----------------

	Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika	Belum tersedianya standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan konsumen
6	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	1. Keterbatasan ketersediaan data 2. Keterbatasan anggaran 3. Perbedaan penentuan prioritas konten di daerah	1. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi 2. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi	1. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah atas informasi yang cepat, murah dan akurat 2. Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi public
7	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
8	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika	Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi	Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek	Banyaknya perguruan tinggi di bidang komunikasi dan informatika
9	Mendorong penciptaan SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul	1. Keterbatasan anggaran 2. Inkonsistensi penempatan sdm dengan kompetensi yang dimiliki	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM unggul
10	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
11	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
12	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Terbatasnya produk lokal	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
14	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

D. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Empat Lawang <i>Cyber City</i>	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal	Sinkronisasi program belum terwujud	Telah adanya dukungan regulasi pendukung

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
		Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Penghambat	Pendorong
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Isu Internal

Peluang

- 1) Adanya Perda No. 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Diskominfo
- 2) Komitmen Bupati terpilih untuk membangun cyber city;
- 3) Adanya kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam membangun area pelayanan wifi gratis bagi masyarakat;

Ancaman

- 1) Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia,
- 2) Koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika masih lemah.
- 3) Fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah belum tersedia;
- 4) belum tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Isu Eksternal

Kelemahan

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah akan pentingnya Informasi
- 2) Kurangnya motivasi masyarakat untuk membentuk komunitas jaringan informasi; Belum terkelolanya data statistik pengolahan data / informasi oleh OPD.
- 3) Belum terkelolanya data statistik OPD secara maksimal.

Kekuatan

- 1) Dukungan investor dalam pengembangan sistem komunikasi sangat tinggi;
- 2) Adanya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur infotel berupa bantuan social ICT, WIM, PLIK dan MPLIK;
- 3) Adanya dukungan yang kuat dari media massa dalam melakukan deseminasi informasi;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN SASARAN

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Memperluas akses informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pembangunan;
3. Meningkatkan peran serta media massa dan kelompok informasi masyarakat sebagai mitra penyediaan informasi yang akurat, aktual dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi yang aman;;
5. Membangun sistem pelayanan informasi elektronik secara terintegrasi dalam rangka mendukung birokrasi berbasis e-government.

2. SASARAN

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan informatika yang mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi;
2. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi dengan jangkauan yang lebih luas, efektif dan efisien;
3. Terciptanya media massa dan kelompok informasi masyarakat yang proaktif dalam mengelola informasi pembangunan;
4. Terkoneksinya aparatur pemerintah dalam jaringan komunikasi dan informasi yang aman;
5. Terselenggaranya pelayanan informasi elektronik secara terintegrasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntut pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Menggali potensi pembiayaan pembangunan infrastruktur dari berbagai sumber;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia aparatur untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang;
- c. Menyusun rencana kegiatan yang efektif, efisien dan partisipatif;
- d. Menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai acuan penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- e. Melaksanakan kegiatan lintas sektor secara tertib dan terpadu.

2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang dalam mencapai tujuan jangka menengah sebagaimana diuraikan di atas adalah :

- a. Mempedomani mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana tugas dinas;
- c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informatika;
- d. Memberdayakan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- e. Berkolaborasi dengan berbagai lembaga baik pusat maupun daerah;
- f. Mengimplementasikan Inovasi Sistem dalam melaksanakan kegiatan;
- g. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif,

efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi e-Government;

- h. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan penyelenggaraan pemerintah ;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan.

Adapun program Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Empat Lawang untuk periode tahun 2013-2018 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah;
8. Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
9. Program Implementasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik;
10. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media;
11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
12. Program Pelayanan sandi dan Telekomunikasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif periode Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada matrik berikut:

Kode	Program dan kegiatan penunjang	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output) penunjang	Data capaian pada awal tahun 2012	Target capaian Kinerja Program , kegiatan penunjang dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	URUSAN WAJIB																
1.2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran										769,351,000		884,753,650		
	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran										materai 6000 : 600 lbr, materai 3000 = 500 lbr	5,100,000	materai 6000 : 600 lbr, materai 3000 = 500 lbr	5,865,000	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pelayanan jaringan internet seluruh SKPD, tersedianya air dan listrik										12 kali pembayaran rekening listrik, 12 pembayaran rekening telepon	19,800,000	12 kali pembayaran rekening listrik, 12 pembayaran rekening telepon	22,770,000	
		4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	kelancaran operasional kendaraan bermotor										2 unit kendaraan roda dua, 5 unit kendaraan roda empat	5,750,000	2 unit kendaraan roda dua, 5 unit kendaraan roda empat	10.500.000	
		5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran										12 bulan	-	12 bulan	-	
		6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	berfungsinya petugas dan peralatan serta bahan pembersih										2 orang	19,200,000	2 orang	22,080,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	lancarnya aktifitas perkantoran									38 jenis	50,000,000	38 jenis	57,500,000	
	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksanya kelancaran administrasi perkantoran									14 jenis cetakan	6,200,000	14 jenis cetakan	7,130,000	
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya peralatan listrik dan penerangan kantor									8 jenis	3,061,000	8 jenis	3,520,150	
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor									1 tahun	10,000,000	1 tahun	11,500,000	
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur									2304 Eksampler	8,640,000	2304 Eksampler	9,936,000	
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya makanan dan minuman rapat pegawai									80 kali	20,000,000	80 kali	23,000,000	
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya kelancaran tugas aparatur									60 kali	150,000,000	60 kali	172,500,000	
	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	terlaksananya kelancaran tugas aparatur									90 Kali	200,000,000	90 Kali	230,000,000	
	15	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya jasa pemenuhan administrasi perkantoran									20 Orang	261,600,000	20 Orang	300,840,000	
	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	alat - alat kebersihan kantor									14 jenis	10,000,000	14 jenis	11,500,000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase tingkat ketersediaan sarana dan aparatur										823,800,000		947,370,000	

			1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional											1 unit kendaraan operasional, 5 unit kendaraan dinas roda dua	350.000,000	1 unit kendaraan operasional, 5 unit kendaraan dinas roda dua		
			2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor											berangkas besi, mesin pemotong rumput, laptop, mesin penghancur kertas, kipas angin, genset, LCD proyektor, AC, Stavolt/Stabilizer, filling Kabinet, Lemari Besi, Komputer White Board, kamera CCTV, Scanner, pemotong kertas, printer, Hardisk external,	265,300,000	-		-
			3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana mebeulair											meja kayu pejabat (2 bh), meja 1/2 biro (10 Bh), kursi kayu pejabat/direktur putar	120,000,000	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa											600,000,000		235,000,000	
	1	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terfasilitasinya peran serta masyarakat dalam membangun keterbukaan akses informasi									10 Kecamatan	500,000,000	10 Kecamatan	120,000,000	
	1	Pengumpulan dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat dan bersih									100 Opini Publik	100,000,000	100 Opini Publik	115,000,000	
	7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah											357,500,000		411,125,000	
	1	Penyusunan Potensi Desa	tersedianya informasi dan data potensi desa									-	-	-	-	
	2	Penyusunan Profil Kabupaten	tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan									100 buku Profil Empat Lawang	57,500,000	100 buku Profil Empat Lawang	66,125,000	
	3	Penyusunan Dokumen Empat Lawang Dalam Angka	tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pembangunan Kabupaten Empat Lawang									100 buku Empat Lawang Dalam Angka	300,000,000	100 buku Empat Lawang Dalam Angka	345,000,000	
	8	Program Pengelolaan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional dan Daerah											400,000,000		325,000,000	
	1	Pengumpulan dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah	tersedianya data informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan									2 buku BDA dan buku PDRB	200,000,000	2 buku BDA dan buku PDRB	175,000,000	
	2	Produk Domestik regional Bruto (PDRB)	tersedianya data informasi untuk masyarakat									2 buku	100,000,000	2 buku	75,000,000	
	3	Indikator Kesejahteraan Empat Lawang	kesejahteraan masyarakat									2 Buku	100,000,000	2 Buku	75,000,000	

			3	Pemetaan Topografi Fiber Optic area dan Pembuatan Site Plan Fiber Optic area	Tersedianya Site Plan Area Fiber Optic												100%	138,000,000	-	-			
			4	Rancangan Smart City Area Kabupaten Empat Lawang	terwujudnya kemudahan akses informasi													100%	143,750,000	-	-		
			5	Pembangunan Jaringan Kabel Fiber Optic Interkoneksi Instansi Pemerintah	Terkoneksinya seluruh instansi vital pemerintah Kabupaten Empat Lawang													± 35 km	38,500,000,000	15 km		16,500,000,000	
			6	Pembangunan Data Center	tersedianya pusat data dan informasi elektronik yang uptodate													1 data center	4,000,000,000	12 bukan operasional		120,000,000	
			7	Fasilitasi Pembuatan Media Publikasi Pemerintah Daerah	tersedianya data dan informasi Publikasi Pemerintah Daerah													100%	400,000,000	100%		460,000,000	
			8	Peliputan dan Dokumentasi KDH dan WKDH	tersedianya data dan informasi Peliputan Dokumentasi KDH dan WKDH													100%	180,000,000	100%		207,000,000	
			9	Penyebaran Informasi Melalui Media Online	tersedianya data dan informasi Online													100%	180,000,000	100%		207,000,000	
			10	Fasilitasi PPID Kabupaten Empat Lawang	terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi daerah													100%	80,000,000	100%		92,000,000	
			11	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN)	terciptanya layanan pengaduan masyarakat													100%	45,000,000	1		51,750,000	
		13	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media																700,000,000			805,000,000	
			1	penyebarluasan informasi pembangunan daerah	tersebarannya informasi pembangunan daerah melalui website resmi pemerintah daerah													12 bulan	80,000,000	12 bulan		92,000,000	
			2	Koran Masuk desa	Tersedianya koran didesa													12 bulan	620,000,000	12 bulan		713,000,000	

			6	Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan rencana kerja bidang											100%	40,000,000	100%	46,000,000		
			7	Koordinasi/ konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah (antar daerah atau antara daerah dengan pusat)	Sinkronisasi Jaring Komunikasi sandi Pusat-Provinsi-Kabupaten dan Instansi Pembina (Jks terbuka/ tertutup/ Gabungan) antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat (Gelar Jks Pusda dan Jks VVIP)												100%	92,000,000	100%	105,800,000	
			8	Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah	terwujudnya sterilisasi dan keamanan informasi dan komunikasi pimpinan daerah												100%	42,845,000	100%	49,271,750	
		15	Program Pelayanan sandi dan Telekomunikasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah															98,023,000		112,726,450	
			1	Pengadaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Persandian dan Telekomunikasi	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan, dan perlengkapan persandian dan telekomunikasi												100%	98,023,000	100%	112,726,450	
																		51,416,339,014		25,356,352,366	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

1. **Indikator**, Menjelaskan indikator untuk mengetahui pencapaian program
2. **Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD**, Mengambarkan kondisi awal sebelum program di laksanakan
3. **Target Capaian setiap Tahun**; Menjelaskan rincian program dan kegiatan tahunan selama 5 tahun periode masa Renstra dan RPJMD.
4. **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD**; Mengambarkan kondisi akhir Renstra setelah 5 tahun berjalan.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang secara langsung akan di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Empat Lawang EMASS.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati yaitu Mewujudkan Empat Lawang EMASS dan selaras dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan Mewujudkan Sumatera Selatan yang Gemilang, melalui program pokok sebagai berikut :

NO	Program Pokok DISKOMINFO yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Warung Informasi Masyarakat (WIM) 2. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2	Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;	2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika	Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan informatika yang mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya pelayanan jaringan internet seluruh SKPD, tersedianya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		kelancaran operasional kendaraan bermotor
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		terlaksananya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		berfungsinya petugas dan peralatan serta bahan pembersih
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		lancarnya aktifitas perkantoran
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		terpenuhinya peralatan listrik dan penerangan kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
			Penyediaan Makanan dan Minuman		terpenuhinya makanan dan minuman rapat pegawai
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		terlaksananya kelancaran tugas aparatur
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		terlaksananya kelancaran tugas aparatur
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		tersedianya jasa pemenuhan administrasi perkantoran
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor		alat - alat kebersihan kantor
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kendaraan dinas / operasional
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		tersedianya peralatan gedung kantor

			Pengadaan Mebeleur		Tersedianya prasarana mebeulair
			Sewa rumah Dinas		tersedianya rumah dinas
			pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		tersedianya jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		berfungsinya gedung kantor dengan baik
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terpenuhinya pakaian dinas aparatur
			Pendidikan dan pelatihan Pormal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya SDM aparatur yang kompeten
			Penyusunan Lakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen RKT, RKA, LPPD, dan LAKIP
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi daerah;	Memperluas akses informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pembangunan	Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi dengan jangkauan yang lebih luas, efektif dan efisien	Monitoring dan Evaluasi PengawAsan dan pengendalian Menara Telekomunikasi	Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa	Termonitor dan terevaluasinya pengawasan dan pengendalian tower komunikasi
			Pemetaan Topografi Telekomunikasi dan pembuatan Site Plan Tower Telekomunikasi		tersedianya Site Plan Tower Telekomunikasi
			Pemetaan Topografi Fiber Optic area dan Pembuatan Site Plan Fiber Optic area		Tersedianya Site Plan Area Fiber Optic
			Rancangan Smart City Area Kabupaten Empat Lawang		terwujudnya kemudahan akses informasi

			Pembangunan Jaringan Kabel Fiber Optic Interkoneksi Instansi Pemerintah		Terkoneksinya seluruh instansi vital pemerintah Kabupaten Empat Lawang
			Pembangunan Data Center		tersedianya pusat data dan informasi elektronik yang uptodate
			Fasilitasi Pembuatan Media Publikasi Pemerintah Daerah		tersedianya data dan informasi Publikasi Pemerintah Daerah
			Peliputan dan Dokumentasi KDH dan WKDH		tersedianya data dan informasi Peliputan dan Dokumentasi KDH dan WKDH
			Penyebaran Informasi Melalui Media Online		tersedianya data dan informasi Online
			Fasilitasi PPID Kabupaten Empat Lawang		terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi daerah
			Fasilitasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN)		terciptanya layanan pengaduan masyarakat
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan masyarakat informasi yang terpercaya dan bermartabat	Meningkatkan peran serta media massa dan kelompok informasi masyarakat sebagai mitra penyediaan informasi yang akurat, aktual dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat	Terciptanya media massa dan kelompok informasi masyarakat yang proaktif dalam mengelola informasi pembangunan	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa	Terfasilitasinya peran serta masyarakat dalam membangun keterbukaan akses informasi

			Pengumpulan dan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik		terpenuhinya kebutuhan informasi yang akurat dan aktual
			Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Program Kerjasama Komunikasi Publik	terbentuknya kelompok informasi masyarakat
			Jambore		terlaksananya Kegiatan kelompok informasi masyarakat
			Pengadaan peralatan komunikasi radio amatir		Tersedianya infrastruktur komunikasi radio amatir
			penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	tersebarinya informasi pembangunan daerah melalui website resmi pemerintah daerah
			Koran Masuk desa		Tersedianya koran didesa
4. Membangun tata kelola komunikasi dan informasi pemerintah yang aman dan terpercaya;	4. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi yang aman;	Terkoneksinya aparatur pemerintah dalam jaringan komunikasi dan informasi yang aman	Pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Tersusunnya analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
			Perumusan kebijakan/ regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah		Tersusun dan tersosialisasinya rumusan kebijakan/ regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah

			Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di pemerintah daerah		terwujudnya keamanan komunikasi dan informasi antar pimpinan daerah melalui jaringan SCA
			Pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah (sumber daya manusia sandi, materiil sandi, dan jaring komunikasi sandi)		Meningkatnya pemahaman aparaturnya bidang persandian tentang sistem pengamanan informasi daerah melalui bimbingan teknis
			Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi		Radiogram (Rdg) berkualifikasi dan rhs dienkripsi, dikirim dan diterima melalui jaring komunikasi sandi (Jks); jumlah aset vital, ruang kerja pimpinan, ruang rapat yang diberi tindakan pam fisik/signal; serta rapat terbatas dilakukan counter surveyland dan jamming
			Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah		Terlaksananya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan rencana kerja bidang

			Koordinasi/ konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah (antar daerah atau antara daerah dengan pusat)		Sinkronisasi Jaring Komunikasi sandi Pusat-Provinsi-Kabupaten dan Instansi Pembina (Jks terbuka/ tertutup/ Gabungan) antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat (Gelar Jks Pusda dan Jks VVIP)
			Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah		terwujudnya sterilisasi dan keamanan informasi dan komunikasi pimpinan daerah
			Pengadaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Persandian dan Telekomunikasi	Program Pelayanan sandi dan Telekomunikasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan, dan perlengkapan persandian dan telekomunikasi
5. Mewujudkan pelayanan informasi elektronik secara terintegrasi	Membangun sistem pelayanan informasi elektronik secara terintegrasi dalam rangka mendukung birokrasi berbasis e-government	Terselenggaranya pelayanan informasi elektronik secara terintegrasi'	Penyusunan Potensi Desa	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	tersedianya informasi dan data potensi desa
			Penyusunan Profil Kabupaten		tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan
			Penyusunan Dokumen Empat Lawang Dalam Angka		tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pembangunan Kabupaten Empat Lawang

			Pengumpulan dan Penyusunan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional Daerah	Program Pengelolaan Informasi, Data dan Statistik Pendukung Kebijakan Nasional dan Daerah	tersedianya data informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan
			Produk Domestik regional Bruto (PDRB)		tersedianya data informasi untuk masyarakat
			Indikator Kesejahteraan Empat Lawang		kesejahteraan masyarakat
			Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Program Implementasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik	terciptanya pelayanan LPSE yang optimal
			Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik		terwujudnya pemahaman masyarakat tentang LPSE
			Pengembangan Sistem Tekno-logi Elektronik Government	Program Pengembangan Elektronik Government Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	terlaksananya sistem teknologi elektronik e government
			Penyusunan Master Plan		terwujudnya kemudahan akses informasi

BAB VII

PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas.

Semakin cepatnya perkembangan Sistem Teknologi Informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan disegala jenis kehidupan yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi sistem teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang Komunikasi dan Informatika bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan sistem informasi ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.